

PENGARUH ISLAM TERHADAP KEKUASAAN POLITIK DI INDONESIA

Abstrak:

Ada tiga fase perkembangan Islam yang dijelaskan dalam tulisan ini. Pertama tentang masuknya Islam ke Indonesia. Pada fase ini Islam sebagai sebuah ide baru di Nusantara mendapatkan tempatnya tidak hanya sebagai agama yang kemudian dianut oleh penduduk asli, tetapi juga mengubah lembaga politik yang semula berbentuk kerajaan bercorak Hindu menjadi bentuk kerajaan yang bercorak Islam.

Fase kedua tentang bagaimana Islam bereaksi terhadap kolonialisme yang masuk ke Indonesia. Perlawanan terhadap kolonialisme dilakukan oleh kelompok Islam selama 3,5 abad. Gerakan perlawanan yang semula bersifat sporadis kemudian berkembang menjadi gerakan politik yang lebih modern karena bangkitnya kesadaran dari kelompok terpelajar Islam yang disebut dengan urban Islam (Islam perkotaan). Di tengah kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang menghambat perkembangan dan pelaksanaan syari'at Islam, kelompok Islam bersikap defensif (bertaban) dan bahkan terus berkembang hingga Islam tetap sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia.

Fase ketiga tentang bagaimana kelompok Islam bersikap pro aktif terhadap persiapan pembentukan negara pasca kemerdekaan. Para tokoh nasionalis islami berusaha untuk menetapkan Islam sebagai asas kehidupan bernegara dan berbangsa setelah pada akhirnya harus berkompromi dengan heterogintas masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *Islam, Indonesia, politik, sejarah*

A. Pendahuluan

Apabila peradaban diberi pengertian kemajuan hidup lahir dan batin maka idealnya peradaban suatu masyarakat menunjukkan suatu kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat disertai dengan kualitas kepribadian sebagai manifestasi dari kerterikatannya pada etika/moral. Peradaban (*civilization*) dapat juga digunakan untuk menunjukkan

sebuah kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknologi tinggi¹ atau merupakan sebuah akumulasi kebudayaan². Jadi peradaban mencakup segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia baik berupa hasil karya kebendaan, sistem sosial atau pun seperangkat idea-idea.

Pada dasarnya semua hasil karya dan perilaku manusia selalu bertumpu pada kompleks ide-ide, gagasan, nilai dan norma. Kemajuan teknologi Barat diilhami oleh gagasan *renaissance*. Perilaku masyarakat yang kolektif dengan tingkat solidaritas yang tinggi juga karena dipengaruhi oleh ide-ide dan norma-norma yang diyakini masyarakat bersangkutan. Apabila Islam diposisikan sebagai kompleks idea dan kumpulan norma maka Islam ideal akan termanifestasi dalam Islam faktual dengan bentuk perilaku maupun hasil karya masyarakat Islam, sekalipun tidak dapat dihindari bahwa akan selalu ada jarak antara yang ideal dengan yang faktual.

Islam yang masuk dan berkembang di wilayah Indonesia dengan inti ajaran tauhid ternyata memiliki daya adaptasi yang luwes dengan budaya setempat. Pada perkembangan selanjutnya Islam ternyata menjadi unsur dominan yang menciptakan bentuk kerajaan-kerajaan bercorak Islam di jaman sebelum kolonialisme dan memberi warna politik terhadap perjuangan pada masa kolonialisme dan sesudahnya. Islam dalam penyebarannya, memasuki dua dimensi sekaligus yaitu dimensi kultural dan dimensi struktural. Dalam dimensi kultural "perkawinan" Islam dengan budaya setempat menghasilkan karya seni, karya bangunan dan lain sebagainya. Dalam dimensi struktural, tak dapat dihindari bahwa orang Islam memiliki orientasi politis. Bagi Islam tidak ada satu unsur kehidupan pun yang dapat terlepas dari "ke-Islaman". Seperti dikatakan Faisal Ismail: Dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan ibadat dan urusan kemasyarakatan dan kebudayaan, karena Islam adalah suatu kebulatan tuntutan hidup tuntutan jiwa, suatu sistem kemasyarakatan dan dasar kekuatan dan tatanan kultural³.

Keterlibatan Islam dalam segala aspek kehidupan membuktikan bahwa Islam bukan semata-mata ritual penyembahan pada sang Khaliq yang terpisah dengan urusan dunia, tetapi Islam menyatukan masalah penyembahan kepada Allah (*hablum minallah*) dengan masalah hubungan antar manusia (*hablum minannas*) dalam sebuah sistem peribadatan. Islam tidak hanya membicarakan bagaimana manusia masuk surga dan neraka tetapi juga bagaimana dengan semangat Islam sebuah masyarakat dapat membentuk sebuah peradaban yang memiliki tingkat kemajuan dalam bidang ilmu, teknologi, seni, tata masyarakat, etika dan norma, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai "*kehalifah fil ard*". Ummat Islam yang

menjiwai Al Qur'an akan tercerahkan, bangkit dan membentuk peradaban Islam yang maju. Tetapi usaha untuk membentuk peradaban Islam bukan tanpa tantangan dan hambatan. Selain hambatan dari dalam masyarakat Islam itu sendiri, tantangan dari luar pun menjadi faktor yang patut diperhatikan.

Pembahasan selanjutnya dari uraian ini akan dibatasi pada masalah bagaimana Islam masuk ke Indonesia dan bersentuhan dengan kekuasaan. Dari aspek rentang waktu, uraian ini akan dibatasi sejak masuknya Islam ke Indonesia hingga pasca kemerdekaan ketika bentuk dan dasar Negara Indonesia telah dirumuskan.

B. Masuknya Islam ke Indonesia dan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia

Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang kapan, siapa dan di mana pertama kali Islam masuk ke Indonesia. Kelompok yang pertama mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara pada awal abad 1 Hijriah atau abad ke 7 Masehi. Para ahli sejarah yang berpendapat demikian diantaranya adalah T.W. Arnold, Syed Naquib Al-Attas, Hamka dan hampir sebagian besar ahli sejarah asal Indonesia.

Menurut Arnold, para pedagang Arab juga menyebarkan Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat-Timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke 7 dan 8 Masehi. Jalur pelayaran dan perdagangan sudah ramai dan bersifat internasional jauh sebelum abad 13 Masehi melalui selat Malaka dan pesisir Barat Sumatra. Keramaian pelayaran melalui perairan tersebut di atas dapat dibuktikan berdasarkan berita dari orang-orang muslim maupun dari Cina dan Jepang. Berita Cina berasal dari abad 7 Masehi dan berita Jepang berasal dari abad 8 Masehi. Berita-berita dari Cina dan Jepang tersebut diperkuat oleh berita-berita dari pelayar-pelayar, ahli geografi, ahli sejarah dan peneliti-peneliti muslim yang berasal dari abad sebelum abad 13 Masehi. Berita Ibnu Khurdadhbih tentang jalan pelayaran dan perdagangan ke Cina pada tahun 846 M, memberikan petunjuk pada Ibnu Batutah untuk mengunjungi kerajaan Samudra Pasai. Nakhoda Buzurg Ibn Shahryan (955 M) mencatat bahwa ia telah menerima laporan tentang Sribijah (Sriwijaya). Kepesatan pelayaran dan perdagangan melalui Selat Malaka dan pesisir Barat Sumatra sejak abad 7 M itu mungkin disebabkan faktor pendorong persaingan perdagangan antara Dinasti Tang di Cina (Asia Timur), Sriwijaya (Asia Tenggara) dan Bani Umayyah (Asia Barat).

Dalam tarikh Cina tersebut bahwa pada tahun 674 M terdapat seorang pemimpin Arab yang mengempal orang-orang Arab yang

menetap di Pantai Barat Sumatra. Sebagian orang-orang Arab ini dilaporkan melakukan perkawinan dengan wanita-wanita lokal, sehingga membentuk komunitas muslim yang terdiri dari orang-orang Arab pendatang dan penduduk lokal. Menurut Arnold, anggota komunitas ini juga melakukan kegiatan-kegiatan penyebaran Islam⁴. Dalam kitab *Aja'ib Al-Hind* (salah satu sumber Timur Tengah) mengisyaratkan tentang adanya komunitas muslim di wilayah kerajaan Hindu-Budha Zabaj (Sriwijaya). Kitab yang ditulis oleh Buzurg bin Syahriyar Al-Ramhurmuzi tahun 390 M ini meriwayatkan kunjungan para pedagang muslim ke kerajaan Zabaj.

Para ahli sejarah yang meyakini bahwa Islam datang ke Nusantara pada awal abad 1 Hijriyah atau abad ke 7 Masehi berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari negeri Arab (Timur Tengah), karena pada waktu itu sudah ada kontak pelayaran dan perdagangan antara Arab, Cina dan Sriwijaya. Dengan asumsi ini dapat diduga bahwa kontak perdagangan ini membawa juga penyebaran agama Islam ke peloksok Nusantara, terutama – pada awal penyebarannya – di daerah pesisir.

Snouck Hurgronje kemudian diikuti oleh J P Moquette dan R A Kern serta beberapa ahli sejarah asal Belanda berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada awal abad ke 13 Masehi. Mereka berpendapat bahwa datangnya Islam ke Indonesia berasal dari anak benua India bukan dari Persia atau Arab. Pijnappel ahli sejarah dari Belanda mengaitkan Islam di Indonesia dengan Gujarat dan Malabar dengan argumentasi bahwa orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi ke wilayah India tersebut membawa Islam ke Indonesia. Pendapat Pijnappel ini kemudian diperkuat oleh Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa begitu Islam berpijak kokoh di beberapa kota pelabuhan anak benua India, muslim Deccar datang ke dunia melayu Indonesia sebagai penyebar Islam pertama disusul kemudian oleh orang-orang Arab. Moquette berpendapat bahwa asal Islam Indonesia adalah Gujarat dengan argumentasi bahwa bentuk batu nisan di Pasai (kawasan utara Sumatra) tercatat 831 H/ 1428 M dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim tercatat 822H/ 1419 M di Gresik Jawa Timur ternyata sama bentuknya dengan batu nisan di Cambaya Gujarat.

Beberapa ahli sejarah terkini asal Indonesia menilai bahwa pendapat Moquette yang didukung oleh Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad 13 M dengan pembuktian makam Sultan Malik As Salih tidaklah tepat, karena Moquette tidak memperhitungkan adanya nisan makam di Leran (Gresik) dalam huruf kufi yang mencatat nama Fatimah Maimun binti Hibatullah

yang wafat tahun 495 H (1102 M)⁵. Mengingat tahun yang tercatat dalam batu nisan tersebut berarti Islam telah ada di pulau Jawa pada abad ke 11 M. Di Pulau Sumatera, terdapat kompleks pemakaman di Barus yang menurut tradisi masyarakat dikenal dengan kompleks makam Tuan Makhdum, terdapat nisan yang mencatat nama Siti Tuhar Amisuri yang wafat tahun 602 H merupakan makam yang lebih tua dari makam Sultan Malik As Saleh. Di Samudra Pasai di Tengku Ibiuh, Blang Me terdapat nisan marmar yang mencatat nama Al Malik Maulana Abd Al Rahman Taj Al Daulah Quth Al Ma'afial-fa-si, tercatat wafat Dhil Qaidah 610 H (1214 M).

Hubungan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang muslim di perairan Selat Malaka makin lama makin menunjukkan kekuatannya sehingga pada awal abad ke 13 M terbentuklah masyarakat muslim di pesisir Samudra yaitu sekitar 15 km dari Lhoksemawe (kini kabupaten Aceh Utara). Dengan ditemukannya nisan Sultan Malik As Saleh yang wafat tahun 696 H (1297 M) membuktikan bahwa di daerah itu sudah terbentuk suatu pemerintahan yang bercorak Islam. Berita Marcopolo yang datang ke Peurelak pada tahun 1292 M dan sumber-sumber hikayat lainnya seperti hikayat raja Pasai dan sejarah Melayu memperkuat dugaan adanya kerajaan Islam pada saat itu.

Tumbuhnya kerajaan Samudra Pasai dapat dihubungkan dengan kondisi politik kerajaan Sriwijaya pada waktu itu yang mulai menunjukkan kelemahannya, sehingga kurang mampu menguasai daerahnya. Situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang muslim yang tidak hanya mendirikan perkampungan pedagang yang bersifat ekonomis tetapi juga membentuk struktur pemerintahan dengan mengangkat Marah Silu, kepala suku Gampong Samudra untuk menjadi Sultan Malik As Saleh. Malaka yang pada abad 14 muncul sebagai pusat pelayaran dan perdagangan kaum muslim, pada awal abad 15M terbentuk menjadi kerajaan bercorak Islam.

Sejak abad 7 dan 8 dengan bentuk pemerintahan bercorak Islam, Samudra Pasai mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam di Nusantara. Muhammad Yamin, Malik S Saleh adalah sultan pertama di Sumatra Utara yang memerintah selama 26 tahun⁶. Kerajaan Islam di Aceh ini pada masa jayanya mengirinkan para ulama Aceh untuk menyiarkan agama Islam ke segala penjuru Nusantara. Pada tahun 1414 M seorang raja Malaka yang bernama Paramesywara diambil menantu oleh raja Pasai dan masuk Islam dengan nama Sultan Iskandar Syah. Dari Malaka Islam menyebar sampai ke Jawa. Pada tahun 1478 M berdirilah kerajaan Demak yang bercorak Islam. Pada masa

kerajaan Demak inilah lahir para ulama terkenal dengan gelar walisongo (sembilan orang wali). Para walisongo inilah yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dari hampir seluruh peloksok Nusantara orang-orang Islam datang ke Demak untuk belajar dari para wali, kemudian menyebarkannya ke daerah-daerah lain.

Kerajaan Islam Demak berdiri dibawah kepemimpinan Raden Patah. Pada tahun 1527 M Fatahillah (Faletehan) yang berasal dari Pasai Aceh yang kemudian bergelar Sunan Gunung Djati dapat menaklukan Sunda Kelapa dan Cirebon. Pada abad ke 16 (1550M) Islam masuk ke Kalimantan dan abad ke 17 Islam masuk ke Sulawesi dan ke bagian Timur Nusantara.

Berakhirnya kerajaan Demak pada tahun 1546 -- setelah 70 tahun memerintah -- karena perlawanan Portugis dan perang saudara, menyebabkan beberapa ulama dan santri para wali songo serta beberapa pejuang Islam meninggalkan Demak dan hijrah ke Pajang, Mataram, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku untuk mencari penghidupan sambil berdakwah. Maka sejak abad 16 Islam telah masuk dan dianut oleh penduduk asli di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

Raja Ternate yang bernama Marhum yang memerintah tahun 1465-1486 M adalah raja yang pertama memeluk agama Islam karena pengaruh dakwah seorang muballig bernama Datuk Maulana Husein yang kemungkinan berasal dari Minangkabau dan belajar ke Demak kemudiah hijrah dan berdakwah ke Maluku Utara.

Raja yang mula-mula memeluk Islam di Makassar adalah Raja Tallo yang bernama I Mailingkaang Daeng Mannyori dan setelah masuk Islam bergelar Sultan Abdullah Awwalul Islam. Menyusul kemudian raja Goa ke 15 Baginda I Mangngerengi Daeng Manrabbia dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin (1591-1638M). Pada abad 17 agama Islam telah dianut oleh seluruh rakyat Gowa dan Tallo.

Proses islamisasi di wilayah Indonesia terjadi melalui beberapa jalur yaitu: Pelayaran dan perdagangan (faktor ekonomi); Proses perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk asli; Da'wah Islam ;Kelembagaan masyarakat (lembaga pendidikan pesantren); Pendidikan sosial budaya.

Pemukiman pedagang muslim membentuk komunitas baru yang berinteraksi dengan komunitas penduduk asli sehingga tercipta suatu proses akulturasi antara dua komunitas tersebut. Bahkan orang-orang Islam pendatang ini dapat mengawini kaum bangsawan dan mengislamkan raja-raja Nusantara sehingga terjadi perubahan politik dari corak kerajaan Hindu menjadi corak kerajaan Islam.

Penyebaran Islam tidak saja dilakukan oleh para pedagang muslim tetapi juga orang-orang Islam yang datang ke Indonesia dengan tujuan utama untuk menyebarkan agama Islam (*muballigh*). Para *muballigh* ini mendirikan pesantren-pesantren yang khusus mempelajari ilmu agama Islam. Pendekatan sosial budaya juga dilakukan dalam menyebarkan Islam. Hal ini dapat dilihat dari hasil karya seni maupun arsitektur bangunan.

Para *muballigh* Islam yang datang dari India Selatan (Pantai Coromandel dan Malabar) adalah penganut mazhab Syafi'i. Disamping itu terdapat pula mazhab Syi'ah yang berkembang di Pantai Barat Sumatra dan sebagian Jawa. Mazhab ini dibawa oleh penganut Syi'ah Ismailiyah yang bersumber dari Persia atau Iran. Pengaruh sufi sangat mendalam di kalangan umat Islam Indonesia yang diperkirakan dibawa oleh para *muballigh* dari Irak dan Iran.

C. Perkembangan Islam di Indonesia pada Masa Kolonialisme.

Proses Islamisasi di Indonesia berkembang sejak abad 7M dan pada abad 13 M muncul kerajaan bercorak Islam yaitu Samudra Pasai yang berkembang hingga awal abad 16M. Keruntuhan kerajaan Samudra Pasai akibat dari penguasaan Selat Malaka dan kota Malaka oleh Portugis. Kerajaan Demak yang berdiri kurang lebih 70 tahun (1478-1548M) juga tidak dapat bertahan lama karena perlawanan yang berat dari Portugis. Kedatangan para pedagang Barat – awalnya Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris – merupakan suatu 'interupsi' sejarah di tengah-tengah transformasi sosial yang relatif damai⁷. Kedatangan para pedagang Barat dengan alasan ekonomi berubah menjadi motivasi politis. Berbeda dengan watak kaum pedagang Arab, Parsi dan India yang bergama Islam serta pedagang Tiongkok yang beragama Budha, pedagang Barat menggunakan kekerasan terutama dengan teknologi persenjataan yang lebih unggul. Selain membawa misi kolonialisme dalam bidang ekonomi dan politik, pedagang Barat membawa pula kegiatan misi kristenisasi.

Islamisasi yang sedang berjalan di wilayah Indonesia terpatahkan oleh dominasi Barat dengan ambisi kolonialisme sejak awal abad 16. Satu persatu kerajaan yang bercorak Islam dilumpuhkan dengan kekuatan senjata. Roeslan Abdulgani berpendapat bahwa: andaikata transformasi sosial itu sudah berjalan dan sudah mendekati proses penyelesaian islamisasi masyarakat Indonesia dengan menemukan suatu sintese baru dengan sumber-sumber kebudayaan asli yang bersaf-saf di berbagai kepulauan Nusantara, maka bangsa kita pada waktu itu akan lebih bertahan menghadapi datangnya unsur-unsur peradaban Barat.⁸

Islamisasi di Indonesia yang belum mencapai tahap optimal menyebabkan daya ketahanan terhadap agresi dari luar sangat minim. Itulah sebabnya sejak abad ke 16 sampai akhir abad 19 (3 abad lebih) Indonesia telah kehilangan kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri. Perbedaan prinsipil antara pedagang Barat dan Timur adalah tujuan untuk mendapatkan kemanfaatan yang lebih dari Indonesia. Profesor Cesar Adib Masul dari Filipina dalam bukunya *Muslim in the Philippines* berpendapat bahwa kelebihan para pedagang muslim adalah menggunakan kelebihan intelektual dan peradabannya untuk mendidik dan mengarahkan alam fikiran dan keagamaan pribumi, belajar bahasa dan adat istiadatnya serta kawin dengan pribumi, berbeda dengan pedagang Eropa yang mengambil hasil tanah dengan cara yang kasar dan kejam⁹.

Proses terlepasnya kemerdekaan sebagian besar wilayah Indonesia oleh kolonialisme bukanlah tanpa perlawanan. Perlawanan terhadap kolonialisme itu diantaranya dilakukan oleh Sultan Agung (Sultan Banten) yang dibantu oleh Syekh Yusuf Al Maghsani dari Makasar. Perlawanan dilakukan pula oleh para Sultan Cirebon keturunan Sunan Gunung Djati, para Sultan dari Palembang dan Jambi (abad ke 17), disusul kemudian dengan perjuangan Sultan Hasanudin dari Makassar, Trunojoyo dan Untung Surapati dari Jawa Timur, Pangeran Surabaya keturunan Sunan Giri dari Gresik, para Pangeran dari Martapura Kalimantan (sepanjang abad ke 18) sampai pada perlawanan Pangeran Diponegoro, perang padri di Sumatra Barat dan para ulama di Aceh pada abad 19 sampai awal abad ke 20.

Islam adalah agama bidimensional yang memiliki aspek *hablumminallah* dan *hablumminannas*. Disamping ritual keagamaan, Islam juga sangat terlibat dengan realitas sosial politik dalam lingkungannya. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* termanifestasi dalam bentuk perilaku yang membangun serta melawan segala bentuk penindasan. Bagi banyak rakyat Indonesia Islam menjadi lambang perlawanan dalam menghadapi sistem diskriminasi dari kolonialisme.

Dalam menghadapi 'interupsi historis' dari pihak luar berupa penetrasi ekonomi, agresi bersenjata dan infiltrasi keagamaan (Kristen) oleh pihak kolonialisme Belanda, maka Islam di Indonesia menumbuhkan jiwa patriotisme anti kolonial. Selama 3,5 abad ditengah-tengah kolonialisme, ajaran Islam tentang *hubbul wathon minal iman* menumbuhkan perlawanan anti kolonialisme dan berorientasi ke arah persatuan seluruh kepulauan Nusantara yang kelak menjadi salah satu landasan yang kokoh bagi bangkitnya nasionalisme Indonesia pada permulaan abad ke 20 Masehi.

Perlawanan rakyat Aceh pada tahun 1872—1908 mencemaskan pemerintah kolonial Belanda. Gerakan perlawanan yang dimotivasi oleh semangat Islam, menjadi masalah utama Belanda dalam mematahkan perlawanan rakyat Indonesia. Untuk mematahkan perlawanan orang-orang Islam di Indonesia, Snouck Hurgronje, yang pada tahun 1889 menjabat penasihat pemerintah Hindia Belanda untuk urusan Arab dan pribumi, merintis politik *divide at impera* (politik pecah belah dan adu domba) di kalangan ummat Islam serta “menjinakkan watak orang-orang Islam. Untuk keperluan itu Snouck Hurgronje sempat bermukim di Makkah secara rahasia untuk menguasai bahasa Arab, ajaran dan sejarah Islam.

Pada peperangan Aceh, Hurgronje menganjurkan kepada pemerintah Belanda agar memecah belah persatuan antara ulu balang dan kaum ulama. Kaum ulu balang didesak dan kaum ulama ditindak secara militer. Mereka yang berhaluan lemah akan dirangkul. Selain itu ajaran-ajaran Islam tentang ketatanegaraan, Pan Islamisme dan perang jihad harus dimatikan dan menyalurkan ajaran-ajaran Islam hanya ke bidang ubudiyah saja. Hurgronje pun menganjurkan agar pelaksanaan ibadah haji dibatasi untuk menghindari hubungan Islam Indonesia dengan Islam Timur Tengah. Kebijakan pembatasan ibadah haji ini dilakukan mengingat kota Makkah dan Madinah pada waktu itu (abad ke 17 dan 18) merupakan pusat jaringan ulama dari berbagai wilayah dunia yang menghasilkan wacana ilmiah yang unik terutama tema pokok pembaruan tentang rekonstruksi sosio moral masyarakat muslim¹⁰. Anjuran-anjuran ini diberlakukan tidak hanya di Aceh tetapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan kebijakan ini diharapkan terbentuklah asosiasi antara Hindia Belanda dengan pemerintahan Belanda di Eropa. Politik Snouck Hurgronje didukung dengan politik etis Van Deventer yang memberi peluang pendidikan Eropa pada pribumi.

Pada awal abad 20 rakyat Indonesia menempuh jalan baru untuk memperjuangkan kemerdekaannya yaitu melalui partai-partai politik. Partai yang tumbuh antara lain Budi Utomo sebagai cerminan nasionalisme kultural di antara pemuda pelajar dan priyayi. Lahir pula Sarekat Dagang Islam sebagai cerminan nasionalisme ekonomi yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam sebagai cerminan dari nasionalisme politik religius. Pada waktu yang bersamaan ummat Islam juga sedang dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan yang sedang dilakukan di Turki dan Mesir.

Perjuangan bercorak Islam dirintis oleh Tjokroaminoto dalam Sarekat Islam dan Haji Agus Salim dalam Jong Islamieten Bond. Pada

tahun 1926 berdiri pula organisasi Nahdlatul Ulama. Menjelang perang dunia kedua dan perang Pasifik, gerakan Islam dapat menghimpun kekuatannya dalam federasi Majelis Islam A'la Indonesia yang dipelopori oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Dalam dominasi Barat (Belanda) atas Indonesia, umat Islam terus berkembang di perkotaan maupun di pedesaan. Bahkan pada perkembangan selanjutnya urban Islam dapat membentuk pergerakan politik melalui partai politik. Pada abad 19 para kiai dan santri di pedesaan melakukan pembenahan lembaga pesantren. Kebangkitan agama sebagai sebuah gerakan mendorong perlawanan menentang kolonialisme. Pemertintah kolonial selalu mencurigai para santri dan berusaha untuk membatasi pengaruh kebangkitan gerakan agama ini.

Berbeda dengan kebangkitan kaum santri pada abad 19 yang bersifat kedesaan, kolot dan konservatif, kaum santri di abad 20 bersifat kekotaan, reformis dan dinamis¹¹. Beberapa partai politik Islam pada masa kolonialisme selain Sarekat Islam (SI) adalah Partai Muslim Indonesia (PMI), Partai Islam Indonesia (PII), Perti dan Penyadar.

Tumbuhnya gerakan politik yang modern di kalangan umat Islam tidak terlepas dari adanya fenomena baru pada waktu itu yaitu terbentuknya kelompok santri perkotaan. Ini adalah sebuah gejala menarik dari sekian banyak peristiwa sejarah umat Islam Indonesia.

Kebijakan politik etis secara tidak langsung mempengaruhi terbentuknya kelas baru santri perkotaan. Walaupun tujuan Belanda menetapkan politik etis adalah agar tercipta asosiasi Hindia Belanda dengan Pemerintah Belanda di Eropa tetapi kebijakan ini justru menumbuhkan kesadaran baru orang-orang Islam di perkotaan. Kesempatan golongan pribumi untuk bersekolah di sekolah Belanda membuat pribumi dapat menerima informasi-informasi keilmuan modern. Orang Islam yang memiliki kesempatan memasuki lembaga pendidikan Eropa namun mendapat pendidikan Islam yang kuat dalam keluarga dan masyarakatnya memiliki kesadaran tentang bagaimana seharusnya Islam dipahami. Mereka melepaskan diri dari taqlid, berpendapat bahwa pintu ijtihad terbuka dan menyerap unsur-unsur Eropa yang kira-kira bermanfaat untuk perkembangan Islam, satu hal yang kurang dilakukan oleh santri pedesaan.¹²

Pada perkembangan selanjutnya tumbuhlah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bentuknya tidak seperti pesantren tetapi mirip dengan lembaga pendidikan Belanda tetapi ditambah dengan muatan pelajaran agama Islam yang kental. Untuk pelajaran agama dan bahasa Arab, lembaga pendidikan ini banyak menggunakan buku-buku dari

Mesir, sedangkan untuk pelajaran umum dipakai buku-buku Belanda. Lembaga pendidikan modern ini diantaranya didirikan oleh Muhammadiyah dan Al Irsyad.

Dengan tumbuhnya lembaga pendidikan Islam modern maka tumbuhlah kelas baru dalam masyarakat perkotaan yaitu urban Islam. Secara hampir bersamaan tumbuh pula gerakan Islam yang berorientasi politik. Selanjutnya lembaga pendidikan Islam modern semakin mendorong tumbuhnya gerakan politik Islam yang modern.

Haji Agus Salim merupakan salah satu perintis tumbuhnya lembaga pendidikan Islam modern. Ia tumbuh dalam keluarga dengan tradisi keagamaan yang kuat dan berkesempatan mengecap pendidikan Eropa. Pada generasi selanjutnya M. Natsir juga merupakan pendiri lembaga pendidikan Islam modern. Dalam proses pendidikannya M. Natsir mempelajari ilmu agama dan ilmu umum pada satu waktu yang bersamaan. Pagi ia belajar di sekolah Belanda dan sore hari mempelajari Islam di surau dibimbing seorang kiai.

Adalah merupakan suatu gejala yang menarik dalam mempelajari gerakan pembaharuan di Indonesia bahwa cendekiawan yang diakui oleh mereka yang berasal dari sekolah agama maupun sekolah Belanda adalah orang-orang yang berasal dari sekolah Belanda seperti Haji Agus Salim dan M. Natsir¹³. Umumnya para pemuda yang menggabungkan diri dengan gerakan modern Islam dan yang berasal dari sekolah Belanda mengenal Islam dari sumber kedua, karena mereka tidak tahu bahasa arab dan sumber pengetahuan mereka adalah buku-buku tentang Islam berbahasa Belanda dan Eropa serta tulisan-tulisan Haji Agus Salim dan M. Natsir¹⁴.

Tumbuhnya partai Islam sebagai tanda dari gerakan modern Islam bukan hanya merupakan ciri bangkitnya kesadaran golongan terpelajar Islam, juga bukan semata-mata reaksi dari tindakan dan kebijakan yang ditetapkan Belanda, tetapi juga merupakan reaksi dari kondisi kemasyarakatan pada waktu itu. Sarekat Islam yang berdiri pada tahun 1912 memiliki 2 alasan mengapa organisasi ini didirikan. Pertama, kompetisi yang meningkat dalam bidang perdagangan batik terutama dengan golongan Cina dan sikap superioritas Cina terhadap orang-orang Indonesia sehubungan dengan berhasilnya revolusi Cina tahun 1911. Kedua, untuk mengatasi tekanan yang dilakukan oleh kaum bangsawan terhadap masyarakat di Solo. Pada periode 1911-1916 perhatian Sarekat Islam tertuju pada masalah organisasi, penyusunan anggaran dasar, usaha mencari pimpinan dan hubungan antara organisasi pusat dan daerah. Pada waktu itu perkelahian antara golongan Cina dan pribumi terus

menerus terjadi, pemogokan pekerja-pekerja perkebunan Krapyak terjadi pula di Mangkunegaran pada bulan Agustus 1912. Menurut pihak penguasa kerusuhan ini disebabkan karena Sarekat Islam. Di lain pihak Sarekat Islam telah berkembang cepat di daerah-daerah lain di Jawa. Melihat kondisi seperti ini residen Surakarta membekukan Sarekat Islam. Pembekuan itu dicabut kembali dengan syarat anggaran dasar dirubah sehingga Sarekat Islam hanya terbatas pada daerah Surakarta saja.

Pada periode 1916-1921 struktur organisasi Sarekat Islam sedikit banyak telah stabil. Dalam periode ini Sarekat Islam banyak memberikan perhatian pada agama, politik dan pendidikan. Cabang-cabang Sarekat Islam dalam periode ini sudah tersebar ke berbagai daerah. Kongres-kongres yang diadakan oleh Sarekat Islam disebut kongres Nasional. Kata "Nasional" bukan saja menunjukkan bahwa peserta kongres berasal dari berbagai daerah, juga mencerminkan suatu usaha yang sadar dari para pemimpin-pemimpinnya untuk menegakkan nasionalisme dengan Islam sebagai dasar pemikirannya. Kata "Nasional" oleh Tjokroaminoto ditafsirkan sebagai usaha untuk meningkatkan seseorang pada tingkat *natie* (bangsa), usaha untuk berjuang menuntut pemerintahan sendiri sekurang-kurangnya agar orang-orang Indonesia berhak untuk mengemukakan suaranya dalam masalah-masalah politik¹⁵. Beberapa hal yang dituntut dan diperjuangkan oleh Sarekat Islam adalah:

Pertama, Menuntut berdirinya dewan-dewan daerah, perluasan hak *volksraad* (Dewan Rakyat) dengan tujuan agar ditransformasikan menjadi lembaga perwakilan yang sesungguhnya untuk keperluan legeslatif.

Kedua, Menuntut penghapusan peraturan yang diskriminatif dalam hal penerimaan murid-murid sekolah.

Ketiga, Menuntut penghapusan peraturan yang menghambat tersebarnya Islam, subsidi untuk lembaga pendidikan Islam dan pengakuan hari besar Islam.

Keempat, Menghendaki pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

Kelima, Menuntut perbaikan dalam bidang pertanian dan agraria, menghapuskan *particuliere landeryen* (milik tuan tanah).

Periode 1921-1927 merupakan tahun perubahan Sarekat Islam. Pertama adalah perubahan dalam Keterangan Asas yang berisi pernyataan kekecewaan terhadap Belanda dimana kebijakan politik etis hanya menguntungkan Belanda dengan menjadikan pribumi sebagai pekerja untuk kepentingan pemerintahan dan ekonomi Belanda. Dalam Keterangan Asas ditekankan kembali perjuangan dan kemerdekaan yang berasaskan Islam. Kedua, perubahan struktur Sarekat Islam. Organisasi

Sarekat dirubah menjadi partai dan anggota-anggota inti yang loyal terhadap Sarekat akan membentuk cabang-cabang partai.

Pada periode 1927-1942 terjadi perpecahan di tubuh partai Sarekat Islam. Pada tahun 1927 partai Sarekat Islam memutuskan untuk mengeluarkan anggota-anggota Muhammadiyah. Sarekat Islam sendiri terpecah menjadi beberapa partai kecil seperti Penyadar dan Komite Kebenaran PSII.

Partai Islam yang lainnya adalah Persatuan Muslimin Indonesia (PMI) yang kemudian menjadi Permi. Permi semula bergerak di bidang pendidikan kemudian menjadi partai politik. Tokoh Permi adalah Haji Ilyas Jakub dan Haji Muchtar yang keduanya pernah mendapat pendidikan dari Mesir. Ketika berada di Mesir keduanya aktif berhubungan dan mengikuti latihan-latihan dari *Hizb wathan* sebuah partai politik di Mesir. Dengan menjalankan politik non kooperasi Permi menyalahkan kapitalisme dan imperialisme sebagai sumber penderitaan rakyat Indonesia. Cita-cita Permi adalah "Islam Mulia" dan "Indonesia Sentosa via Indonesia Merdeka". Karena itu Permi percaya bahwa ajaran Islam hanya dapat ditegakkan setelah Indonesia merdeka.

Partai Islam Indonesia (PII) berdiri tahun 1938. Tokoh-tokoh pendiri partai ini adalah orang-orang Sarekat Islam yang keluar dari partai karena tidak setuju dengan kebijakan yang ditetapkan Partai Sarekat Islam. PII menghendaki negara kesatuan yang dilengkapi oleh pemerintah yang demokratis, dengan sebuah lembaga perwakilan berdasar pemilihan umum yang bersifat langsung dan umum.

Pada dasarnya terdapat 3 golongan Islam dalam masa kolonialisme Belanda yaitu kalangan tradisi yang umumnya dibesarkan di pesantren tradisional, golongan pembaharu yang berkesempatan mengecap pendidikan Eropa tetapi memiliki komitmen yang kuat kepada Islam dan golongan terpelajar Islam tetapi mengambil sikap netral terhadap agama. Pada waktu-waktu tertentu terdapat usaha-usaha dari ketiga golongan ini untuk mengatasi perbedaan dan pertentangan yang muncul dengan membentuk satu forum bersama agar dapat membentuk aksi bersama.

Dengan demikian politik kolonial Belanda tidak berhasil mengisolasi agama Islam di Indonesia dari pengaruh luar negeri dan Islam di Indonesia tetap berkembang baik dalam aspek ubudiyah, mu'amalah maupun orientasi politiknya¹⁶. Perkembangan pemikiran modern Islam di Indonesia terutama tentang pemikiran politik Islam tidak diperhatikan oleh Snouck Hurgronje. Ia tidak pula menduga kemungkinan tumbuhnya Islam yang bersifat nasional dan semata-mata

negara berdasarkan kebangsaan tanpa ada kaitan dengan ideologi agama, sedangkan kelompok nasionalis islami mengajukan agar Islam dijadikan sebagai dasar Negara¹⁹. Istilah nasionalis islami menunjuk pada para nasionalis yang berpandangan bahwa negara dan masyarakat harus diatur oleh Islam sebagai agama, sedangkan para nasionalis sekuler – muslim; kristen dan lainnya – adalah orang-orang yang berpegang pada pemisahan tegas agama dan negara²⁰. Kedua aliran pikiran ini sebenarnya memiliki akar yang kuat sejak bangkitnya pergerakan nasional di Indonesia.

Awal pergerakan nasional dari nasionalis sekuler adalah Budi Utomo (1908), sedangkan nasionalis islami mendirikan Sarekat Dagang Islam yang kemudian menjadi Sarekat Islam (1911). Dalam bidang pendidikan nasionalis sekuler mendirikan Taman Siswa (1922) dan pada nasionalis islami ada Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926). Perhimpunan politik para nasionalis sekuler adalah Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI, 1927) dan Gabungan Politik Indonesia (GAPI), sedangkan komunikasi antar organisasi Islam terhimpun dalam Majelis al-Islam A'la Indonesia (MAI, 1937). Perbedaan aliran pikiran ini juga tercermin dalam polemik antara Soekarno (yang mewakili nasionalis sekuler) dengan M. Natsir (mewakili nasionalis islami)²¹. Kedua aliran ini pada akhirnya bertemu dalam BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) dengan suatu dialog yang sangat serius untuk menentukan dasar Negara Indonesia.

Ketika kekaisaran Jepang mengumumkan akan adanya kemerdekaan bagi segenap rakyat Indonesia²² maka langkah pertama pelaksanaan janji ini adalah dengan membentuk *Dokuritu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan disingkat BPUPK) pada tanggal 29 April 1945. BPUPK beranggotakan 62 orang dan 15 orang diantaranya mewakili kelompok nasionalis islami.

Dalam sidang pertama²³ BPUPK tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengungkapkan Lima Asas untuk dasar Negara Indonesia yaitu Peri kebangsaan, Peri kemanusiaan, Peri ketuhanan, Peri kerakyatan dan kesejahteraan. Sedangkan pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 mengajukan Lima Sila yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan, Ketuhanan.

Rumusan Lima Sila Soekarno sebenarnya bukanlah konsep baru bagi Soekarno. Pada tahun 1933 dalam konferensi Partindo (Partai Indonesia) Soekarno menyatakan bahwa asas kebangsaan (Marhaenisme) adalah Internasionalisme, Demokrasi, Keadilan Sosial. Karena itu Lima

Sila Soekarno maupun Lima Asas Yamin merupakan pernyataan kembali empat segi Marhaenisme (yang dirumuskan tahun 1933) ditambah ketuhanan²⁴. Dipastikan bahwa Soekarno dan Muhammad Yamin menemukan prinsip ketuhanan ini dari pikiran dan cita-cita yang diungkapkan oleh para pemimpin Islam di Badan Penyelidik yang menolak kebangsaan dan mengajukan Islam sebagai dasar Negara²⁵. Apalagi mengingat Soekarno merupakan pembicara terakhir dalam sidang itu yang berusaha untuk mencakup pikiran-pikiran para anggota sebelumnya (ide-ide dari para pemimpin Islam yang berbicara sebelumnya).

Setelah sidang pertama berakhir, 38 orang melanjutkan pertemuan dan membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang (disebut panitia 9). Dalam panitia 9 ini tercapailah kesepakatan antara nasionalis islami dengan nasionalis sekuler tentang konsep preambule yang nantinya akan menjadi mukadimah (pembukaan) dari Undang-Undang Dasar Negara. Dalam paragraf terakhir *preambule* dinyatakan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Pada tanggal 10 Juli 1945 ketika sidang paripurna Badan Penyelidik dilaksanakan kalimat "kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi pembahasan yang cukup alot. Pada tanggal 11 Juli 1945, dinyatakan bahwa pokok-pokok dalam preambule dianggap sudah diterima. Karena preambule ditandatangani oleh 9 anggota (Panitia 9) pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta, maka preambule dikenal juga dengan nama "Piagam Jakarta" (*The Jakarta Charter*).

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, keesokan harinya diadakan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan (dibentuk tanggal 7 Agustus 1945). Agenda rapat pada waktu itu untuk menyampaikan empat perubahan penting yaitu:

1. Kata "mukadimah" diganti dengan kata "pembukaan"
2. Dalam Preambule (Piagam Jakarta), anak kalimat: "Berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa".
3. Pasal 6 ayat 1, "Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, kata-kata "dan beragama Islam" dicoret.
4. Sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka Pasal 29 ayat 1 menjadi "Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa", sebagai pengganti "Negara berdasarkan Ke-

Tuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Panitia Persiapan Kemerdekaan menerima dengan bulat teks perubahan preambule dan batang tubuh UUD 45 ini pada hari itu juga. Perubahan cepat ini dilakukan karena menurut Mohammad Hatta, seorang kaigun (angkatan laut Jepang) datang mengatasnamakan orang-orang Katolik dan Protestan di Indonesia Timur yang menyatakan keberatan dengan 7 kata terakhir pada sila ketuhanan. Banyak kontroversi terjadi dalam menanggapi peristiwa sejarah tentang perubahan preambule dan batang tubuh UUD 45 ini diantaranya :

Perrama, Bahwa Jepang turut berperan dalam penyusunan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Kedua, “Piagam Jakarta” yang didapat dengan susah payah oleh tokoh-tokoh terkemuka bangsa Indonesia, kemudian dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam beberapa menit saja dapat dirubah. Apa sebabnya? Menurut keterangan M. Hatta perundingan untukmenghilangkan 7 kata dalam sila pertama hanya berlangsung 15 menit dan itu terjadi antara pukul 9.30 sampai 11.30 pada tanggal 18 Agustus 1945. Konsensus Nasional (Piagam Jakarta) yang dicapai dengan susah payah melalui perdebatan sengit dicairkan oleh usul orang asing (kaigun Jepang) dengan mengatasnamakan orang-orang Katolik dan Protestan di Indonesia Bagian Timur. Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Badan Penyelidik dalam waktu 10 hari (29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 10 Juli samapi 16 Juli 1945) dirubah dalam tempo 2 jam (Pukul 9.30-11.30 tanggal 18 Agustus 1945). Nampaknya bahaya perpecahan dianggap lebih berat dari pada dikecewakannya golongan Islam.

Ketiga, hanya empat orang penandatanganan Piagam Jakarta yang ditunjuk sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan. A. Wahid Hasyim sebagai satu-satunya Nasionalis Islami penandatanganan Piagam Jakarta yang ditunjuk menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan, tidak hadir dalam perundingan perubahan preambule dan batang tubuh UUD 45²⁶.

Alamsyah Ratu Perwiranegara mengatkan bahwa Pancasila adalah hadiah terbesar ummat Islam untuk Indonesia karena bersedia menghilangkan tujuh kata dalam sila pertama demi persatuan dan kesatuan Republik Indonesia²⁷. Jasa para Nasionalis Islami (dalam hal ini H. Agus Salim, Abikusno Tjokrosuyoso, KHA Wahid Hasyim, KHA Kahar Muzakkir) adalah bahwa mereka turut serta dalam merumuskan formula resmi Pancasila dalam Piagam Jakarta, tetapi letak pengorbanan mereka bukanlah terletak pada peranan mereka dalam penggantian 7 kata

dalam sila pertama melainkan pada sikap diam tidak mengadakan tantangan dan perlawanan ketika Piagam Jakarta dirubah pada tanggal 18 Agustus 1945²³.

E. Kesimpulan

Islam datang ke Nusantara dengan cara damai, tetapi ia memiliki daya ekspansi yang besar dalam penyebaran ide-idenya. Penyebaran Islam tidak hanya dilakukan oleh para muballigh yang memang memiliki tugas da'wah, tetapi juga oleh para pedagang muslim yang pada awalnya memiliki tujuan ekonomi. Bermula dari satu komunitas muslim yang menempati satu wilayah, muslim pendatang kemudian mengalami proses akulturasi dengan penduduk asli dan bahkan dapat mengislamkan penguasa setempat sehingga timbullah kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Pada fase inilah awalnya Islam bersentuhan dengan kekuasaan di Nusantara.

Islam telah sangat mengakar di Indonesia sehingga ia tidak kehilangan "kepribadiannya" ketika kolonialisme datang ke Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang menghambat perkembangan Islam tidak menyebabkan Islam kehilangan kekuatannya. Dalam konteks politik pada masa kolonialisme itu, interaksi Islam dengan kekuasaan merupakan semangat perlawanan terhadap penguasa. Selain itu kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk meredam gerakan politik ummat Islam pada waktu itu tidak cukup berhasil, karena ternyata Islam memiliki kemampuan *survive* di tengah aksi kolonialisme tersebut. Kebangkitan gerakan politik Islam tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran beragama *urban Islam*. Perlawanan sporadis yang semula dilakukan oleh *rural Islam* berkembang menjadi bentuk gerakan yang lebih modern melalui partai-partai politik Islam. *Urban Islam* dalam partai-partai politik menjadi semakin kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda dan terhadap kondisi sosial pada waktu itu.

Pada masa pasca kemerdekaan, interaksi Islam dengan kekuasaan berorientasi pada pembentukan Negara merdeka yang berasas Islam. Heterogenitas rakyat Indonesia menyebabkan para tokoh Islam harus mengadakan kompromi dalam aspek-aspek tertentu dengan berbagai unsur masyarakat lainnya seperti para tokoh nasionalis sekuler dan para pemeluk agama lain.

Catatan Akhir:

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985) hal. 156.

² Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985) hal. 78.

- ³ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis dan Refleksi Historis* (Yogyakarta, 1996), hal. 137.
- ⁴ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung, 1998), hal. 27.
- ⁵ Uka Tjandra Sasmita, *Proses Kedatangan Islam dan Munculnya Kerajaan Islam di Aceh dalam Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung, 1983), hal. 490.
- ⁶ H.A. Moerad, *Islam di Indonesia Bagian Timur dan Hubungannya dengan Kerajaan Aceh Darussalam dalam Sejarah Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung, 1981), hal. 490.
- ⁷ Roeslan Abdulgani, *Islam datang ke Indonesia Membawa Tamaddun/ Kemajuan/ Kecerdasan dalam Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung, 1981), hal. 117.
- ⁸ *Ibid*, hal 119.
- ⁹ *Ibid*, hal 118.
- ¹⁰ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama*, hal.16.
- ¹¹ *Ibid*, hal 81
- ¹² Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta, 1988) hal. 323-325.
- ¹³ *Ibid*, hal. 329.
- ¹⁴ *Ibid*, hal. 330.
- ¹⁵ *Ibid*, hal. 126.
- ¹⁶ Roeslan Abdulgani, *Islam Datang ke Indonesia*, hal 127.
- ¹⁷ Deliar Noer, *Gerakan Modern*, hal. 336.
- ¹⁸ *Ibid*, hal. xviii.
- ¹⁹ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis "Sekuler" Tentang Dasar Negera Republik Indonesia 1945-1959* (Bandung, 1983), hal. 83.
- ²⁰ *Ibid*, hal. 8
- ²¹ *Ibid*, hal. 9.
- ²² Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso mengumumkan di depan resepsi istimewa *The Imperial Diet* yang ke 85 pada tanggal 7 September 1944.
- ²³ Rapat BPUPK dilaksanakan dalam 2 kali sidang yaitu tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 dan 10 Juli-16 Juli 1945.
- ²⁴ Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, hal. 17.
- ²⁵ *Ibid*, hal. 19.
- ²⁶ *Ibid*, hal 42-48.
- ²⁷ *Ibid* hal. 49
- ²⁸ *Ibid*, hal 50.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Roeslan. *Islam Datang ke Nusantara Membawa Tamaddun dalam Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: Al Ma'arif, 1981..
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1998.

Ismail, Faisal. *Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis dan Refleksi Historis*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996.

Kuntowijoyo. *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan.

Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.

Saifuddin Anshari, Endang. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis "Sekuler" Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. Bandung: Penerbit Pustaka.

Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

_____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.

Tjandrasasmita, Uka. "Proses Kedatangan Islam dan Munculnya Kerajaan-kerjaan Islam di Aceh" dalam *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: Al Ma'arif: Bandung, 1981.

Usman, A Murad." Islam di Indonesia Bagian Timur dan Hubungannya dengan Kerajaan Aceh Darussalam" dalam *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: Al Ma'arif, 1981.

Wazin Baihaqi, adalah dosen pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN "SMHB" Serang.